

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Tugu Kecamatan Sendang dan menyimpulkannya berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan ADD telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya pelaporan sudah menunjukkan prinsip transparansi, namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami adanya keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan serta pengawasan dari pihak kecamatan maupun inspektorat dalam penggunaan dana serta adanya sistem pelaporan yang setiap tahun mengalami perubahan supaya memperoleh hasil pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of the principle of transparency and accountability of village government in the management of ADD measured in terms of planning, implementation, administration, reporting, and accountability.

This research uses qualitative method with descriptive approach, which is describe the management of ADD in Tugu Village of Sendang Sub-district and conclude it based on Permendagri 113 in year 2014. The informants in this research consist of Village Head, Village Chamberlain, Kaur Development, and member of Community Empowerment Institution (LPM). Techniques of collecting data using interviews, observation, and documentation. Technical data analysis starts from data reduction, data presentation, conclusion and verification.

The results of this research indicate that Tugu Village Government in village financial management has not implemented transparency principle related to Budget Plan (RAB). But in the implementation and management of ADD management has implemented the principles of transparency and accountability. In the reporting effort has shown the principle of transparency, but in accountability reporting efforts still experience a delay due to lack of human resource capabilities. While the accountability of ADD physically is in accordance with the provisions of existing regulations, but from the administrative side is still required the improvement and supervision of the district and inspectorate in the use of funds and the existence of a reporting system that every year changes in order to obtain the results of village financial management in accordance with the provisions legislation.

Keywords: village fund allocation, transparency and accountability.

Nama Mahasiswa

NPM

Tanggal Masuk

Tanggal Sertesi

Abstrak ini adalah memung betul transaksi dan LPP
Seusai dengan aslinya yang telah disetujui oleh dosen pembimbing



BAHASA
Pengajar LAB BAHASA